



LAPORAN KINERJA (LKj)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 telah selesai disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak selama tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak 2021-2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2024.

Akhir kata, kepada seluruh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 ini saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Siak Sri Indrapura, 11 Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**

Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M. Si
NIP. 196908161990021002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Bidang Kewenangan.....	1
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	6
1.4 Isu Strategis DPMK.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja 2024.....	12
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	13
2.4 Standar Penilaian Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja DPMK.....	18
3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	18
3.1.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	32
3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	33
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta Solusi Yang Telah Dilakukan.....	34
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
3.1.6 Capaian Program dan Kegiatan.....	37
3.2 Realisasi anggaran.....	38
3.2.1 Ikhtisar Realisasi Belanja.....	38
 BAB IV PENUTUP.....	46

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis (RENSTRA) DPMK Kabupaten Siak Tahun 2021-2026
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMK Kabupaten Siak Tahun 2021-2026
3. Perjanjian Kinerja DPMK Kabupaten Siak Tahun 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, kami bermaksud akan mengadakan pembinaan/asistensi kepada aparatur OPD dalam teknis penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pelaporan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategi atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai.

1.2 Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan. Tugas dan fungsi sekretaris sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;
- f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi kampung, teknologi tepat guna, lembaga kemasyarakatan kampung dan adat, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung;
- c. Perumusan pedoman pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi kampung, teknologi tepat guna, lembaga kemasyarakatan kampung dan adat, partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. Perumusan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi kampung, teknologi tepat guna, lembaga kemasyarakatan kampung dan adat, partisipasi dan swadaya masyarakat;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung sebagai bahan evaluasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

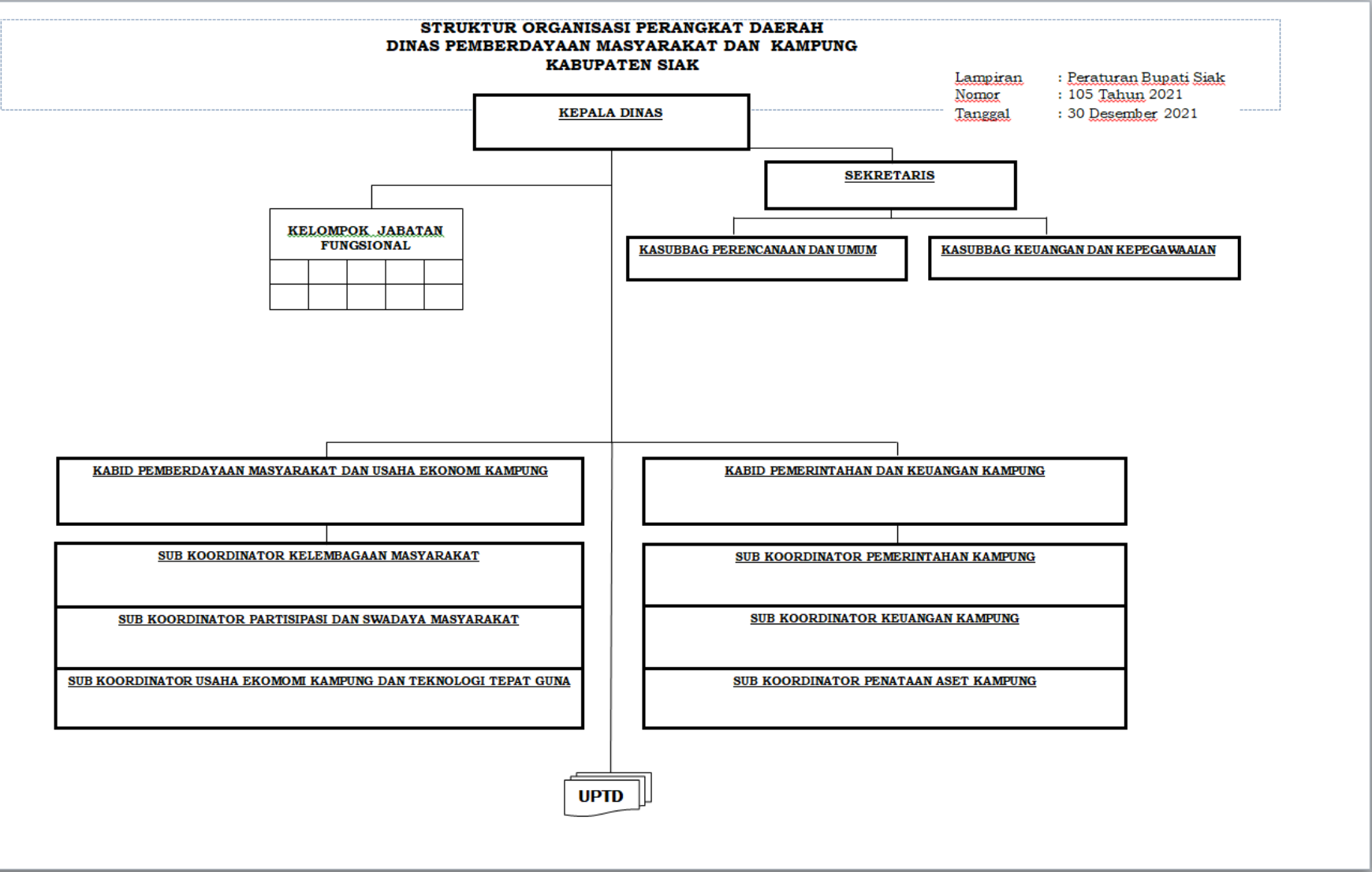
Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) serta penyelenggaraan keuangan dan aset Kampung;

- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan dalam rangka perencanaan pembangunan Kampung serta pembinaan penertiban administrasi keuangan dan aset Kampung;
- c. Penggabungan dan atau penghapusan kampung/ kelurahan serta peningkatan pendapatan kampung;
- d. Perumusan pedoman pelaksanaan fasilitasi peningkatan status Kampung menjadi kelurahan serta kegiatan pembinaan dan administrasi kekayaan Kampung;
- e. Penyelenggaraan usaha-usaha dalam rangka pembinaan Perangkat dan administrasi Kampung/kelurahan serta menyusun pedoman anggaran pendapatan dan belanja Kampung (APBKampung);
- f. Penyusunan pedoman pelaksanaan pemilihan Penghulu dan perangkat Kampung;
- g. Penyusunan pedoman pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) ;
- h. Penyiapan bahan dalam rangka pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan Kampung dan Kelurahan;
- i. Pemberian petunjuk kepada pejabat non struktural dan bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- j. Pengkoordinasian kepada pejabat non struktural dan bawahannya dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Penilaian pelaksanaan tugas pejabat non struktural agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung sebagai bahan evaluasi;
- n. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pemerintahan dan keuangan kampung; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

1.2. Struktur Organisasi DPMK Kab. Siak



1.3. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai berikut :

1.3.1 Susunan Kepegawaian

Adapun kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 1.3.1.1

**Jumlah Pegawai PNS dan Honor di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung**

NO	STAF PNS DANNON PNS	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	2
4	Jabatan Fungsional	3
5	Pelaksana	9
6	Honorar pemda	5
7	Honorar kantor	15
8	Tenaga supir	1
9	Petugas keamanan	4
10	Petugas kebersihan	5
JUMLAH		48

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2024

Jumlah pegawai PNS, Honorar, Supir dan Kebersihan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2024 sebanyak 40 orang terdiri dari :

1. PNS : 18 Orang
2. Honorar : 20 Orang
3. Supir : 1 Orang

4. Kebersihan : 5 Orang

Dari PNS terdiri dari Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana

1. Struktural : 6 Orang

2. Fungsional : 3 Orang

3. Pelaksana : 9 Orang

Tabel 1.3.1.2
Jumlah Pegawai dan Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	7
3	Strata 1 (S-1)	21
4	Diploma 3	1
5	SLTA/SMK/MA	16
6	SLTP	2
7	SD	1
JUMLAH		48

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2024

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, yang secara total berjumlah 48 orang, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana, Pasca Sarjana, berjumlah 31 orang atau sekitar 64,58% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan.

Tabel. 1.3.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	12
3	Golongan II	1
4	Golongan I	-
JUMLAH		18

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2024

Sedangkan bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.1.3. pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 12 orang (66,66%).

1.3.2 Analisis Kepegawaian

Dari peta jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bawah dapat kita ketahui bahwa kebutuhan ASN sebanyak 69 orang terdiri dari 6 orang jabatan struktural, 3 orang jabatan fungsional dan 9 orang jabatan pelaksana dan masih ada 51 orang jabatan ASN yang dibutuhkan belum terisi yaitu : 24 orang Jabatan Fungsional dan 27 orang Jabatan Pelaksana.

Kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak sebagai berikut :

1.3.2. Peta Jabatan DPMK Kabupaten Siak

PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK

JABATAN	Kls	B	K	+/-
KEPALA DINAS	14	1	1	0

KEKUATAN PEGAWAI				
M/e :	III/d :	7	II/d :	-
M/d :	III/c :	3	II/c :	1
M/c :	III/b :	-	II/b :	-
M/b :	III/a :	2	II/a :	-
M/a :		1		

18 ORANG TERDIRI DARI								
Es.I	:		Es.III	:	3	JFT	:	3
Es.II	:	1	Es.IV	:	2	JFU	:	9

JABATAN	Kls	B	K	+/-
JF Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	-1
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	0	2	-2

JABATAN	Kls	B	K	+/-
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung	11	1	1	0

JABATAN	Kls	B	K	+/-
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	2	3	-1
JF Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
JF. Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	1	-1
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	7	0	2	-2
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
JF Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
JF. Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	8	-6
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

JABATAN	Kls	B	K	+/-
Sekretaris	12	1	1	0

JABATAN	Kls	B	K	+/-
Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum	9	1	1	0

JABATAN	Kls	B	K	+/-
JF. Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	-1

JABATAN	Kls	B	K	+/-
Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung	11	1	1	0

JABATAN	Kls	B	K	+/-
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	1	3	-2
JF Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
JF Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
JF. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	7	0	2	-2
JF. Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
JF Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
JF. Pranata Komputer Mahir	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Penata Kelola Pemerintahan	7	0	3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

JABATAN	Kls	B	K	+/-
Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian	9	1	1	0

JABATAN	Kls	B	K	+/-
JF Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	3	-2

UPT

1.4. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Isu Strategis merupakan suatu proses yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap suatu organisasi atau instansi. Analisis lingkungan melibatkan sejumlah upaya memilah secara utuh menjadi bagian untuk mengetahui sifat dasar, fungsi dan hubungannya. Dengan mengadakan Analisis lingkungan, suatu perencanaan strategis organisasi atau instansi memiliki kesempatan untuk mengantisipasi peluang dan membantu perencana strategis dalam mengantisipasi peluang dan tantangan serta membuat rencana guna melakukan pilihan terhadap peluang dan menghadapi tantangan yang ada.

Adapun isu-isu strategis yang di hadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung antara lain;

1. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan kampung memahami tugas dan fungsi
2. Keberdayaan masyarakat masih rendah
3. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kampung

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

- ❖ Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- ❖ Penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan Masyarakat dan kampung.
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan Masyarakat dan kampung.
- ❖ Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- ❖ Pelaksanaan urusan tata usaha dinas. dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dibidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak disusun berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak adalah **“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Budaya Melayu”**. Guna mendukung tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran yang akan diraih antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Lembaga Ekonomi Kampung;
Indikator : Persentase Kampung Mandiri
2. Meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung
Indikator : Persentase Kelembagaan Masyarakat Perkampungan yang aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada dokumen RPJMD, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Siak menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
DPMK Kabupaten Siak Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kampung Mandiri}}{\text{Jumlah Kampung}} \times 100\%$

2	Meningkatkan lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100\%$
---	--	--	---	--------	--

Sumber Data : IKU Dinas Masyarakat dan Kampung Tahun 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan dokumen Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

2.2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN SIAK			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	40,98%
2.	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	91,15%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.833.726.692,00	APBD-P
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 336.495.400,00	APBD-P
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 5.529.582.500,00	APBD-P
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 3.084.546.000,00	APBD-P



BUPATI SIAK

Drs. H. ALFEDRI M.Si

Siak Sri Indrapura, November 2024



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**

Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19830613 201102 2 002

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana anggaran tahun merupakan proses perencanaan penetapan program dan kegiatan untuk satu tahun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja. Rencana kinerja tahunan disusun dengan menyajikan sasaran, indikator kinerja dan target, kemudian program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, termasuk satuan dan target. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja, diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagaimana terlampir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melaksanakan 4 (Empat) Program, sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Rencana Anggaran Tahunan 2024
DPMK Kabupaten Siak Tahun 2024

Program	Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)
1	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : - Dana Out put : - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Out come : - Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rupiah Orang/Bulan Persen	2,921,886,002.00 12.00 100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Out come : - Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Paket Persen	39,229,550.00 25.00 100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Paket Persen	208,836,800.00 69.00 100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Paket Persen	83,613,000.00 13.00 100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Dokumen Persen	13,300,000.00 1.00 100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Out come : - Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Laporan Persen	1,154,583,500.00 580.00 100.00

Program	Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)
1	6	7	8	9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel	Input : - Dana Out put : - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Persen	226,834,200.00 24.00 100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Persen	276,012,790.00 24.00 100.00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Out come : - Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Rupiah Unit Persen	29,920,000.00 1.00 100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Persen	16,178,000.00 1.00 100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Persen	11,678,300.00 1.00 100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Out come : - Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor	Rupiah Laporan Persen	2,407,078,750.00 20.00 100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	18,900,000.00 6.00 100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : - Dana Out put : - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	379,785,000.00 6.00 100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	32,200,000.00 39.00 0.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : - Dana Out put : - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Out come : - Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPMK Kabupaten Siak	Rupiah Unit Persen	13,690,800.00 1.00 100.00

Program	Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)
1	6	7	8	9
Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Input : - Dana	Rupiah	336,495,400.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1.00
		Out come : - Jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung	Persen	49.18%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Input : - Dana	Rupiah	1,090,125,400.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	2.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input : - Dana	Rupiah	2,169,355,700.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	46.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Input : - Dana	Rupiah	408,117,600.00
		Out put : - Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	267.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Input : - Dana	Rupiah	164,633,200.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Input : - Dana	Rupiah	886,181,100.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	2.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Input : - Dana	Rupiah	573,104,600.00
		Out put : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	1.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Input : - Dana	Rupiah	238,064,900.00
		Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1.00
		Out come : - Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi	Persen	97.54%

Program	Sub Kegiatan			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)
1	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif		
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Dokumen Persen	185,188,000.00 2.00 71.31%
	Penngkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Lembaga Persen	186,492,200.00 1.00 71.31%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Dokumen Persen	1,726,898,000.00 47.00 71.31%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Laporan Orang	27,343,800.00 1.00 71.31%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Input : - Dana Out put : - Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Laporan Unit	142,462,500.00 1.00 71.31%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Input : - Dana Out put : - Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Out come : - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Rupiah Dokumen Persen	816,161,500.00 1.00 71.31%
4 Program	30 Kegiatan			16,784,350,592.00

2.4 STANDAR PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	0 s/d 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan evaluasi kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak

3.1.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Adapun rincian tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel. 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.1

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	40,98 %	100,00%	244,02	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	91,15 %	91,95%	100,88	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja					172.45	

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 yang terdiri dari dua (2) sasaran strategis dan dua (2) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua (2) sasaran dengan dua (2) indikator kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”** artinya capaian kinerja **91% ≤ 100%**.

Uraian dari analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja Peningkatan persentase kampung mandiri dengan capaian kinerja sasaran sebesar **91% ≤ 100%** termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

Pengukuran kinerja indikator peningkatan persentase kampung mandiri tahun 2024 yaitu 100,00% (122 kampung mandiri) dari target sebesar 40,98% (50 kampung mandiri) dengan capaian kinerja indikator 244,02% (100%).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp. 336.495.400
2. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp.1.090.125.400
3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Rp.2.169.355.000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp.408.117.600
4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp. 164.633.200
5. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 573.104.600
6. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp. 238.064.900

Dalam rangka untuk menilai Status Indeks Desa Membangun (IDM) dibagi menjadi lima status, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal,

Desa Berkembang, Desa Maju, Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur untuk mengetahui kemajuan pembangunan desa. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).

Klasifikasi status IDM adalah sebagai berikut :

- Desa Sangat Tertinggal: nilai IDM kurang dari 0,491
- Desa Tertinggal: nilai IDM lebih dari 0,491 dan kurang dari 0,599
- Desa Berkembang: nilai IDM lebih dari 0,599 dan kurang dari 0,707
- Desa Maju: nilai IDM lebih dari 0,707 dan kurang dari 0,815
- Desa Mandiri: nilai IDM lebih dari 0,815

IDM digunakan pemerintah untuk mengukur status perkembangan desa dan menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan IDM, desa-desa dapat mengetahui posisi mereka dalam skala pembangunan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :



Tabel 3.1.2

Penetapan Status Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
E-mail: dpmkkabsiak@gmail.com

BERITA ACARA
PENETAPAN STATUS DESA

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun 2024 bertempat di:

1. Kabupaten : SIAK
2. Provinsi : RIAU

Telah dilakukan Verifikasi di Tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran status perkembangan desa IDM Tahun 2024 dengan hasil sebagai terlampir,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Di sahkan Team Verifikasi



(Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP. 19690816 199002 1 001



(Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M.Si)
NIP. 19690816 199002 1 001



(WIWIET NOVITA B. S.Si)

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2024

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012003	LANGKAI	0.9543	0.8333	1.0000	0.9292	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012011	TUMANG	0.9143	0.9333	1.0000	0.9492	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012012	MEREMPAN HULU	0.8343	0.8333	0.9333	0.8670	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012013	RAWANG AIR PUTIH	0.9600	0.9000	1.0000	0.9533	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012014	SUAK LANJUT	0.9371	0.8000	1.0000	0.9124	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140801	SIAK	1408012015	BUANTAN BESAR	0.8457	0.8000	0.8667	0.8375	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022002	TELUK LANUS	0.7829	0.7833	0.9333	0.8332	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022003	TANJUNG KURAS	0.8229	0.8333	0.8000	0.8187	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022004	PARIT I/II	0.8857	0.6000	1.0000	0.8286	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022005	TELUK MESJID	0.8629	0.8500	1.0000	0.9043	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022008	SUNGAI KAYU ARA	0.9371	0.8667	0.8000	0.8679	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022009	LALANG	0.8800	0.7667	0.8667	0.8378	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022010	MENGKAPAN	0.8857	0.7833	0.8667	0.8452	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022011	SUNGAI RAWA	0.8743	0.6667	1.0000	0.8470	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022012	PENYENGAT	0.8857	0.7500	0.8667	0.8341	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022014	TELUK BATIL	0.9029	0.9167	0.6667	0.8287	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022016	BUNSUR	0.8000	0.8167	0.8667	0.8278	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022017	HARAPAN	0.8171	0.7000	1.0000	0.8390	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022019	KAYU ARA PERMAI	0.8229	0.7500	0.9333	0.8354	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140802	SUNGAI APIT	1408022020	RAWA MEKAR JAYA	0.8629	0.8000	0.8667	0.8432	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140803	MINAS	1408032002	MINAS TIMUR	0.9314	0.8000	0.9333	0.8883	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140803	MINAS	1408032003	MINAS BARAT	0.9543	0.8833	0.6667	0.8348	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140803	MINAS	1408032004	MANDI ANGIN	0.9771	0.8833	1.0000	0.9535	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140803	MINAS	1408032005	RANTAU BERTUAH	0.9029	0.8500	0.8667	0.8732	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140804	TUALANG	1408042002	TUALANG	0.9886	0.7333	0.7333	0.8184	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140804	TUALANG	1408042003	PINANG SEBATANG	0.9714	0.8333	0.6667	0.8238	MANDIRI

14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042004	MEREDAN	0.9600	0.7500	0.9333	0.8811	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042005	SEBATANG	0.9714	0.7667	0.7333	0.8238	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042006	SEBATANG	0.9600	0.8667	0.8667	0.8978	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042007	MEREDAN	0.9543	0.7333	0.9333	0.8737	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042008	PERAWANG	1.0000	0.9333	0.8667	0.9333	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140804	TUALANG	1408042009	TUALANG	0.9314	0.6833	0.8667	0.8271	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	SUNGAI	1408052001	MUARA	0.9314	0.8667	0.9333	0.9105	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	MANDAU	1408052002	TELUK	0.8057	0.7167	0.9333	0.8186	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	SUNGAI	1408052003	SUNGAI	0.8743	0.6833	1.0000	0.8525	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	MANDAU	1408052004	SELODANG	0.8971	0.9333	0.8667	0.8990	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	SUNGAI	1408052005	OLAK	0.9029	0.6500	1.0000	0.8510	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	MANDAU	1408052006	LUBUK	0.8171	0.6500	1.0000	0.8224	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	SUNGAI	1408052007	BUNGGAL	0.8000	0.6500	1.0000	0.8167	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	MANDAU	1408052008	LUBUK	0.8686	0.8167	1.0000	0.8951	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	SUNGAI	1408052009	UMBUT	0.8286	0.6500	1.0000	0.8262	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140805	MANDAU	1408052009	BENCAH	0.8286	0.6500	1.0000	0.8262	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062001	UMBAL	0.9771	0.9167	0.9333	0.9424	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062002	TASIK	0.9257	0.8500	0.9333	0.9030	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062003	BETUNG	0.9086	0.8167	0.9333	0.8862	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062004	BANJAR	0.9200	0.7833	0.8667	0.8567	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062005	SEMINAI	0.9029	0.7333	0.9333	0.8565	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062006	TELUK	0.8743	0.8667	0.8667	0.8692	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062007	MERBAU	0.9486	0.7500	0.9333	0.8773	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062008	BERUMBUN	0.8571	0.8167	1.0000	0.8913	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062009	G BARU	0.9086	0.9500	0.8000	0.8862	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062010	PANGKALAN	0.9771	0.8500	0.9333	0.9202	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140806	DAYUN	1408062011	MAKMUR	0.9714	0.8833	0.9333	0.9294	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI	1408072001	BUANA	0.9143	0.8333	0.7333	0.8270	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KANAN	1408072002	MAKMUR	0.8800	0.8500	0.8667	0.8656	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI	1408072003	KIRI	0.9371	0.8167	0.8000	0.8513	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KANAN	1408072004	BAKTI	0.8743	0.7667	0.9333	0.8581	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI	1408072004	HARAPAN	0.8743	0.7667	0.9333	0.8581	MANDIRI

14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072005	KUMBARA UTAMA	0.9371	0.8333	0.8667	0.8790	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072006	BUKIT AGUNG	0.8686	0.9000	0.8000	0.8562	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072008	SIMPANG PERAK JAYA	0.8457	0.7833	0.8667	0.8319	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072009	BUATAN BARU	0.8514	0.7833	0.9333	0.8560	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072010	GABUNG MAKMUR	0.8686	0.8167	0.8000	0.8284	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072011	JATI MULYA	0.8971	0.7667	0.8000	0.8213	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072012	SEMINAI	0.8743	0.7667	1.0000	0.8803	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140807	KERINCI KANAN	1408072013	DELIMA JAYA	0.8629	0.7500	0.8667	0.8265	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082001	BUNGA RAYA	0.8743	0.9167	0.9333	0.9081	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082002	JATI BARU	0.9200	0.7333	0.9333	0.8622	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082003	JAYAPURA	0.8743	0.8667	0.8000	0.8470	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082011	KEMUNING MUDA	0.8857	0.6333	0.9333	0.8175	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082012	BUATAN LESTARI	0.7829	0.7500	0.9333	0.8221	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082013	TUAH INDRAPURA	0.8000	0.7500	1.0000	0.8500	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082014	LANGSAT PERMAI	0.8400	0.8167	1.0000	0.8856	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082015	TEMUSAI	0.8171	0.8833	0.9333	0.8779	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082016	DAYANG SURI	0.8514	0.7667	0.9333	0.8505	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140808	BUNGA RAYA	1408082017	SUAK MERAMBAI	0.8114	0.8000	0.8667	0.8260	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092001	PANGKALAN PISANG	0.9257	0.6667	0.9333	0.8419	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092002	KUALA GASIB	0.8114	0.7833	0.8667	0.8205	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092003	TELUK RIMBA	0.8514	0.7833	0.8667	0.8338	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092004	BUATAN I	0.8857	0.7167	0.8667	0.8230	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092005	BUATAN II	0.8743	0.7833	0.8000	0.8192	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092006	SENGKEMANG	0.7886	0.7667	0.9333	0.8295	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092007	RANTAU PANJANG	0.8229	0.7000	0.9333	0.8187	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092008	EMPANG PANDAN	0.9314	0.6833	0.8667	0.8271	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092009	KERANJI GUGUH	0.8457	0.7667	0.8667	0.8263	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092010	SRI GEMILANG	0.8057	0.8000	0.8667	0.8241	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140809	KOTO GASIB	1408092011	TASIK SEMINAI	0.8514	0.7500	0.8667	0.8227	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140810	KANDIS	1408102004	BELUTU	0.8400	0.8833	0.8000	0.8411	MANDIRI

14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102005	KANDIS	0.9257	0.8667	0.8000	0.8641	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102006	SAM-SAM	0.8400	0.6833	1.0000	0.8411	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102007	BEKALAR	0.8743	0.7000	0.9333	0.8359	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102008	JAMBAI MAKMUR	0.8686	0.7333	0.9333	0.8451	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102009	SUNGAI GONDANG	0.8971	0.7000	0.8667	0.8213	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102010	PENCING BEKULO	0.8514	0.7333	0.9333	0.8394	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140810	KANDIS	1408102011	LIBO JAYA	0.8800	0.7833	0.9333	0.8656	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112001	LUBUK DALAM	0.9314	0.8833	1.0000	0.9383	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112002	RAWANG KAO	0.9257	0.8667	1.0000	0.9308	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112003	SRI GADING	0.9086	0.8167	0.8667	0.8640	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112004	SIALANG BARU	0.8686	0.6667	1.0000	0.8451	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112005	SIALANG PALAS	0.8857	0.6333	0.9333	0.8175	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112006	EMPANG BARU	0.9486	0.8000	0.8667	0.8717	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140811	LUBUK DALAM	1408112007	RAWANG KAO BARAT	0.8457	0.9167	0.8667	0.8763	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122001	BANDAR SUNGAI	0.9257	0.8167	0.8000	0.8475	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122002	REMPAK	0.8514	0.7333	0.9333	0.8394	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122003	BELADING	0.8000	0.8500	0.9333	0.8611	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122004	SUNGAI TENGAH	0.7943	0.8333	0.9333	0.8537	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122005	LAKSAMANA	0.9257	0.8333	0.8667	0.8752	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122006	SABAK PERMAI	0.9314	0.7667	0.8667	0.8549	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122007	BANDAR PEDADA	0.7886	0.8833	0.9333	0.8684	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140812	SABAK AUH	1408122008	SELAT GUNTUNG	0.8171	0.7667	0.8667	0.8168	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132001	KOTA RINGIN	0.8457	0.7500	0.9333	0.8430	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132002	PALUH	0.8229	0.7000	0.9333	0.8187	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132003	BENTENG HILIR	0.8800	0.7333	0.8667	0.8267	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132004	BENTENG HULU	0.9371	0.8500	0.7333	0.8402	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132005	KAMPUNG TENGAH	0.8514	0.8333	0.8667	0.8505	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132007	MEREMPAN HILIR	0.9086	0.7667	0.8000	0.8251	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140813	MEMPURA	1408132008	TELUKMERE MPAN	0.8400	0.8167	0.8667	0.8411	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIAK	140814	PUSAKO	1408142001	SUNGAI BERBARI	0.8457	0.7667	0.9333	0.8486	MANDIRI

14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142002	SUNGAI LIMAU	0.8914	0.8500	0.8667	0.8694	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142003	DOSAN	0.8857	0.7000	0.9333	0.8397	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142004	BENAYAH	0.8743	0.7000	0.9333	0.8359	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142005	PEBADARAN	0.9086	0.7833	0.8000	0.8306	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142006	DUSUN PUSAKA	0.9143	0.9000	0.6667	0.8270	MANDIRI
14	RIAU	1408	SIK	140814	PUSAKO	1408142007	PERINCIT	0.8800	0.7000	0.9333	0.8378	MANDIRI

Di sahkan Team Verifikasi

Kepala Bappeda
Kabupaten

(Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si)
Pembina Utama Muda
NIP. 19690816 199002 1 001

Kepala DPMD
Kabupaten

(Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M.Si)
NIP. 19690816 199002 1 001

Koordinator Tenaga Ahli
Kabupaten

(WIWIET NOVITA B. S.Si)

Sasaran 2 : Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif dengan capaian kinerja sasaran sebesar **91% ≤ 100%** termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

Pengukuran kinerja indikator Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif tahun 2024 yaitu 91,95% (3644 lembaga yang aktif) dari target sebesar 91,15% (3379 lembaga yang aktif) dengan capaian kinerja indikator 100,88%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 185.188.000
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 186.492.200
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp. 1.726.898.000
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp. 27.343.800
5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp. 142.462.500
6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp. 816.161.500

Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga sosial yang mengatur tata cara dan prosedur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan Masyarakat.

Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif dihitung dengan membagi jumlah lembaga yang aktif dengan jumlah lembaga yang ada, kemudian dikalikan 100%.

$\frac{\text{Persentase lembaga yang aktif}}{\text{jumlah lembaga yang ada}} \times 100\%$
--

Data kelembagaan desa/kelurahan yang aktif meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Kampung (RK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Karang Taruna dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Data Keaktifan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan/ Kampung
Se Kabupaten Siak Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KAMPUNG / KELURAHAN	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN / KAMPUNG												KETERANGAN
			RT		RK		LPM		PKK		POSYANDU		KARANG TARUNA		
			Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	SIK	Kel. Kampung Dalam	22	22	6	6	1	1	1	1	5	5	0	0	
		Kel. Kampung Rempak	22	22	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Langkai	11	11	4	4	1	1	1	1	5	4	1	1	
		Tumang	15	15	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Merempan Hulu	10	10	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Rawang Air Putih	7	7	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Suak Lanjut	8	8	2	2	1	1	1	1	2	2	1	0	
		Buntan Besar	11	11	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
2	SUNGAI APIT	Kel. Sungai Apit	21	21	7	7	1	1	1	1	9	9	1	1	
		Teluk Lanus	12	12	4	4	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Tanjung Kuras	14	14	3	3	1	0	1	1	3	3	1	1	
		Parit VII	12	12	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Teluk Mesjid	21	21	10	10	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Sungai kayu Ara	13	13	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Lalang	12	12	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Mengkapen	15	15	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Sungai Rawa	12	12	3	3	1	0	1	1	2	2	1	0	
		Penyengat	14	14	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Harapan	13	13	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Teluk Batil	12	12	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Bunsur	8	8	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Kayu Ara Permai	12	12	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Rawa Mekar Jaya	10	10	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1	
3	MINAS	Kel. Minas Jaya	59	59	13	13	1	1	1	1	12	12	1	1	
		Minas Timur	24	24	8	8	1	1	1	1	3	3	1	0	
		Minas Barat	27	27	8	8	1	1	1	1	7	7	1	0	
		Mandi Angin	20	20	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Rantau Bertuah	12	12	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	KANDIS	Kel. Telaga Sam-sam	20	20	8	8	1	1	1	1	5	5	0	0	
		Kel. Kandis Kota	44	44	14	14	1	1	1	1	7	7	0	0	
		Kel. Simpang Belutu	32	32	8	8	1	1	1	1	4	4	0	0	
		Belutu	35	35	10	10	1	1	1	1	7	7	1	1	
		Kandis	27	27	9	9	1	1	1	1	5	5	1	0	
		Sam-sam	40	40	16	16	1	1	1	1	8	8	1	1	
		Pencing Bekulo	12	12	4	4	1	0	1	1	3	3	1	0	
		Sungai Gondang	11	11	4	4	1	0	1	1	2	2	1	0	
		Jambai Makmur	22	22	6	6	1	0	1	1	4	4	1	0	
		Bekalar	21	21	8	8	1	1	1	1	7	7	1	1	
		Libo Jaya	26	26	11	11	1	1	1	1	5	5	1	0	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG / KELURAHAN	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN / KAMPUNG												KETERANGAN
			RT		RK		LPM		PKK		POSYANDU		KARANG TARUNA		
			Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
5	LUBUK DALAM	Lubuk dalam	20	20	5	5	1	1	1	1	12	12	1	1	
		Rawang Kao	15	15	3	3	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Sri Gading	18	18	6	6	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Sialang Baru	21	21	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Sialang Palas	16	16	4	4	1	1	1	1	2	2	1	0	
		Empang Baru	15	15	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Rawang Kao Barat	8	8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	KERINCI KANAN	Kerinci Kanan	18	18	6	6	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Kerinci Kiri	18	18	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Buana Bhakti	14	14	6	6	1	1	1	1	3	3	1	0	
		Bukit Harapan	12	12	6	6	1	0	1	1	3	3	1	1	
		Kumbara Utama	12	12	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Bukit Agung	14	14	4	4	1	0	1	1	3	3	1	0	
		Delima jaya	12	12	4	4	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Simpang Perak Jaya	21	21	7	7	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Buatan Baru	15	15	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Gabung Makmur	12	12	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	
		Jati Mulya	13	13	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Seminai	22	22	9	9	1	1	1	1	3	3	1	1	
7	KOTO GASIB	Pangkalan Pisang	24	24	5	5	1	1	1	1	15	15	1	1	
		Kuala Gasib	16	16	6	6	1	0	1	1	4	4	1	0	
		Teluk Rimba	4	4	2	2	1	0	1	1	2	2	1	0	
		Buatan I	11	11	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Buatan II	21	21	6	6	1	0	1	1	3	3	1	1	
		Sengkemang	8	8	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Rantau Panjang	12	12	3	3	1	1	1	1	3	3	1	0	
		Empang Pandan	20	20	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		KerANJI Guguh	18	18	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Sri Gemilang	6	6	2	2	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Tasik semina	11	11	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
8	TUALANG	Kel. Perawang	91	91	8	8	1	1	1	1	15	15	1	1	
		Tualang	68	68	9	9	1	1	1	1	12	12	1	1	
		Pinang Sebatang	19	19	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Maredan	22	22	7	7	1	1	1	1	7	7	1	1	
		Pinang Sebatang Timur	23	23	6	6	1	1	1	1	4	4	1	0	
		Pinang Sebatang Barat	19	19	6	6	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Maredan Barat	12	12	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Perawang Barat	84	84	11	11	1	1	1	1	14	14	1	1	
		Tualang Timur	20	20	7	7	1	0	1	1	4	4	1	1	
9	SUNGAI MANDAU	Muara Kelantan	10	10	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Teluk Lancang	2	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
		Sungai Selodang	15	15	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Olak	8	8	4	4	1	0	1	1	2	2	1	0	
		Lubuk Jering	7	7	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Muara Bungkal	6	6	3	3	1	0	1	1	3	3	1	1	
		Lubuk Umbut	8	8	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Bencah Umbai	5	5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
		Tasik Betung	5	5	3	3	1	0	1	1	3	3	1	0	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG / KELURAHAN	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN / KAMPUNG												KETERANGAN
			RT		RK		LPM		PKK		POSYANDU		KARANG TARUNA		
			Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	Kuan.	aktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
10	DAYUN	Dayun	24	24	8	8	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Banjar Seminai	22	22	7	7	1	1	1	1	4	4	1	0	
		Teluk Merbau	19	19	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Merangkai	14	14	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Lubuk Tilan	15	15	5	5	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Berambung baru	21	21	7	7	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Pangkalan Makmur	16	16	5	5	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Buana makmur	15	15	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Suka Mulya	14	14	4	4	1	0	1	1	1	1	1	0	
		Sawit Permai	16	16	8	8	1	0	1	1	6	6	1	0	
		Sialang sakti	20	20	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
11	BUNGARAYA	Bungaraya	18	18	7	7	1	1	1	1	4	4	1	1	
		Jati Baru	28	28	8	8	1	1	1	1	5	5	1	1	
		Jaya Pura	18	18	7	7	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Kemuning Muda	16	16	6	6	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Bualan Lestari	14	14	6	6	1	1	1	1	3	3	1	0	
		Tuah Indrapura	18	18	6	6	1	1	1	1	3	3	1	0	
		Langsat Permai	15	15	7	7	1	1	1	1	3	3	1	1	
		Suak Merambai	4	4	2	2	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Temusai	14	14	7	7	1	0	1	0	2	2	1	0	
		Dayang Suri	8	8	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
12	MEMPURA	Kel. Sungai Mempura	18	18	5	5	1	1	1	1	5	5	1	1	
		Kota Ringin	7	7	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Paluh	8	8	3	3	1	0	1	1	2	2	1	0	
		Benteng Hilir	11	11	4	4	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Benteng Hulu	14	14	4	4	1	0	1	1	3	3	1	1	
		Kampung Tengah	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Merempan Hilir	11	11	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	
		Teluk Merempan	6	6	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	
13	SABAK AUH	Bandar Sungai	12	12	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Rempak	15	15	6	6	1	1	1	1	2	2	1	0	
		Laksamana	11	11	5	5	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Belading	8	8	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Sungai Tengah	17	17	7	7	1	0	1	1	3	3	1	0	
		Selat Guntung	11	11	4	4	1	0	1	1	1	1	1	1	
		Sabak Permai	12	12	6	6	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Bandar Pedada	8	8	4	4	1	0	1	0	1	1	1	0	
14	PUSAKO	Sungai Berbari	4	4	2	2	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Dosan	6	6	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Sungai Limau	7	7	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	
		Dusun Pusaka	9	9	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Pebadaran	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Benayah	6	6	4	4	1	0	1	1	2	2	1	1	
		Perincit	6	6	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Kelembagaan Aktif			2175	2175	700	700	131	101	131	129	443	442	127	97	
Jumlah Persentase Kelembagaan Aktif			100.00%		100.00%		77.10%		98.47%		99.77%		76.38%		
Total Persentase			91.95%												

3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak
Tahun 2022 s.d. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	6	8	7	9	11	10	9	11	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	%	24.59	35.24	143.33 (100)	32.79	89.34	272.46 (100)	40.98	100.00	244.02 (100)
2.	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	%	82.32	89.82	109.11 (100)	86.73	89.82	103.56 (100)	91.15	91.95	100.88

Sumber Data: 1. Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Siak Tahun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, pengukuran kinerja indikator peningkatan persentase kampung mandiri tahun 2024 sebesar 100,00% (122 kampung) terjadi peningkatan 10.66% dari tahun 2023 sebesar 89,34% (109 kampung), di tahun 2023 juga terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 54.10% dari tahun 2022 sebesar 35,24% (24 kampung).

Untuk pengukuran kinerja indikator persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif tahun 2024 sebesar 91,95% terjadi peningkatan sebesar 2,13% dari tahun 2023 sebesar 89,82%, di tahun 2023 tidak ada peningkatan kinerja dari tahun 2022 masih sama realisasi sebesar 89,82%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dengan Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis DPMK Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPMK Kabupaten Siak
berdasarkan capaian tahun sebelumnya dengan target Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023			2024			Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	
			Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%	2025	2026
1	4	5	6			7				8		9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung	Peningkatan persentase kampung mandiri	24,59%	35,24%	143,33	32,79%	89,34%	272,46	40,98%	100,00%	244,02	49,18%	57,38%
2	Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan dan adat kampung yang aktif	82,32%	89,82%	109,11	86,73%	89,82%	103,56	91,15%	91,95	100,88	95,56	100%

Sumber: Renstra DPMK Kab. Siak tahun 2021 sd 2026

Pada sasaran strategis DPMK terdapat 2 indikator kinerja dimana ke 2 indikator kinerja tersebut sudah melampaui target. Dengan demikian maka secara umum DPMK Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMK Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Solusi yang telah dilakukan

3.1.4.1 Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kinerja kepada Pemerintah Kampung agar menggunakan Sistem Digitalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong Pemerintah Kampung melakukan penginputan Aplikasi IDM dengan pengisian data sesuai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam penyelenggaraan tata pemerintahan kampung.
4. Penguatan kapasitas tenaga pendamping pengelolaan keuangan kampung.
5. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara baik dan tertib.
6. Seluruh Kampung telah menggunakan Aplikasi Sistem Sipades secara baik dan tertib
7. Penguatan kapasitas lembaga ekonomi kampung.
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung seperti dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan kampung.
9. Adanya pembinaan dan pengawasan kinerja dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten

3.1.4.2 Permasalahan atau hambatan:

1. Masih adanya beberapa faktor yang diperhatikan oleh pemerintah kampung sesuai indikator Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indek Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) .
2. Masih perlu beberapa Perangkat Kampung yang belum optimal menggunakan aplikasi Siskeudes dan Sipades.
3. Jaringan Internet pada beberapa Kampung belum maksimal tersedia.
4. Masih perlunya pemahaman Kelembagaan Kemasyarakatan tentang tugas dan fungsi sehingga masih adanya beberapa kelembagaan belum berperan secara aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintahan kampung

3.1.4.3 Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat:

1. Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah kampung agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan melalui Indek Desa Membangun (IDM) agar bisa mempertahankan dan meningkatkan status Desa Mandiri Saat ini.
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung.
3. Melakukan evaluasi terhadap keaktifan program dan kegiatan kelembagaan kampung dan kelurahan.

3.1.5 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, serta visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia;.

2. Sumber Daya Keuangan

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan di bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, sekarang belum memiliki gedung kantor yang kondusif. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku yang baik. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak secara kualitatif sudah baik.

Eselonisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak terdiri dari: 1 (satu) orang eselon II-B Kepala Dinas, 1 (satu) orang eselon III-A Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang eselon III-B Kepala Bidang, 2 (dua) orang eselon IV-A Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional, 9 (sembilan) orang pelaksana, 20 (dua puluh) Orang Honorer, 1 (satu) orang supir, 4 (empat) orang petugas keamanan dan 5 (lima) orang Petugas kebersihan . Tingkat pendidikan sumber daya aparatur dengan komposisi sebagai berikut: Lulusan S2 : 14.58%, Lulusan S1 : 43.75%, Lulusan DIII : 2.08%, lulusan SLTA : 33.33%, lulusan SLTP : 4.17% dan lulusan SD : 2.08%. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas pegawai akan tetap terus dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Dilihat dari segi kuantitatif, Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak masih sangat kurang dan memerlukan tambahan pegawai ASN sebanyak 51 orang.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat dilihat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Kegiatan (DPPA) Tahun 2024, pada APBD Perubahan melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

3.1.6. Capaian Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak pada Tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) program dengan hasil capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan target 100%, realisasi terpenuhi 98,31% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator kinerja tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 98,60%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan indikator kinerja tingkat kepatuhan aparatur dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan indikator kinerja tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 98,52%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja pengadaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 87,53%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

2. Program peningkatan kerja sama desa dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan indikator kinerja jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100,00% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja cakupan pemerintah desa yang tertib administrasi dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100,00%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan target 100%, realisasi terpenuhi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target 100% dan capaian realisasi kinerja 100%, capaian kinerja termasuk kategori capaian **“Sangat Tinggi”**.

3.2.REALISASI ANGGARAN

3.2.1Ikhtisar Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024.

3.2.1 Ikhtisar Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Siak

No Rek			URAIAN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1			2	3	4	5
5			BELANJA DAERAH	16.784.350.592,00	12.889.565.903,00	76,80
5	1		BELANJA OPERASI	16.287.216.102,00	12.889.565.903,00	76,80
5	1	01	Belanja Pegawai	3.100.323.502,00	2.512.727.666,00	81.05
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.186.892.600.00	10.376.838.237,00	78,69
5	2		BELANJA MODAL	497.134.490,00	0,00	0,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.134.490,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Siak Tahun 2024

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp 16.784.350.592,00** terbagi menjadi 4 (empat) program, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yang dibagi menjadi 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 12.889.565.903,00** atau **76,80%** dari pagu anggaran. Keseluruhan realisasi per sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai

b

erikut (data terlampir berupa Laporan Kinerja), sedangkan capaian realisasi belanja pelaksanaan kegiatan di bawah 75% dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

a.1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor terealisasi sebesar Rp 88.642.500 atau 42,45% dari Rp 208.836.800, dikarenakan adanya tunda bayar honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah dan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga untuk pekerjaan belanja alat/bahan kegiatan kantor berupa alat tulis kantor kertas dan cover, bahan cetak serta bahan komputer.
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebesar Rp 23.160.000 atau 27,70% dari Rp 83.613.000, dikarenakan adanya tunda bayar honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah dan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga untuk pekerjaan belanja alat/bahan kegiatan kantor berupa kertas dan cover serta bahan cetak.
- Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan prundang-undangan terealisasi sebesar Rp 9.080.000 atau 68,27% dari Rp 13.300.000, dikarenakan Belanja dibayarkan riil sesuai dengan yang diterima, selain daripada itu terdapat belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak diklaim sehingga belanja realisasi belanja menjadi kecil.

a.2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Pengadaan Mebel terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00% dari Rp 226.834.200, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan p

rovinsi ke daerah serta kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Mebel.

- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00% dari Rp 276.012.790, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah serta kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00% dari Rp 29.920.000, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah serta kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya..

a.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar Rp 10.600.000 atau 65,52% dari Rp 16.178.000, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah.
- Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi sebesar Rp 313.000 atau 2,68% dari Rp 11.678.300, dikarenakan belanja dibayarkan riil sesuai dengan yang diterima, selain dari pada itu terdapat belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tidak diklaim sehingga realisasi belanja menjadi rendah.

a.4. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp 8.473.235 atau 44,83% dari Rp 18.900.000, dikarenakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil BM 1438 S dan BM 1256 S tidak ditemukan/hilang sehingga pajak kendaraan tidak bisa dibayarkan, serta tidak ada nya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk Mobil BM 8268 S.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp 9.950.000 atau 30,90% dari Rp 32.200.000, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi sebesar Rp.0 atau 0,00% dari Rp 13.690.800, dikarenakan adanya tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD yang disebabkan oleh belum di salurkannya transfer dana pusat dan provinsi ke daerah serta kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

-

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

b.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 541.631.200 atau 49,63% dari Rp 1.090.125.400, dikarenakan tunda bayar belanja honorarium admin agen cantik.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 343.420.200 atau 38,75% dari Rp 886.161.200, dikarenakan tunda bayar belanja honorarium Bendahara, PPTK dan PPK OPD dan belanja barang dan jasa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa terealisasi sebesar Rp. 271.149.300 atau 60,48% dari Rp 573.104.600, dikarenakan ada tunda bayar belanja honorarium

Bendahara, PPTK dan PPK OPD dan belanja barang dan jasa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

c.1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar Rp. 493.631.200 atau 60,48% dari Rp 816.161.500, dikarenakan telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja tim penggerak PKK selama 1 tahun, akan tetapi untuk progres kurangnya dalam pembayaran kegiatan tersebut dapat memenuhi pelaksanaannya dikarenakan transfer anggaran APBD mengalami keterlambatan yang berujung kepada tunda bayar APBDP Kabupaten Siak 2024.

3.2.1 Rincian Realiasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak

Uraian Program (Indikator)/Kegiatan/Sub Kegiatan		TARGET/ REALISASI					
		OUTCOME PROGRAM DAN SUB KEGIATAN		PAGU / REALISASI (RP)			
		Target	Realisasi	Pagu	Kuungan	%	FISIK
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				16,784,350,592	12,889,565,903	76.80	99.21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,833,726,692	6,164,169,098	78.69	98.31
Indikator : Persentase Ketercapaian Palayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah							
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2,921,886,002	2,474,815,166	84.70	98.60
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25	18	2,921,886,002	2,474,815,166	84.70	98.60
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	39,229,550	38,650,000	98.52	100
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Orang	25 Orang	39,229,550	38,650,000	98.52	100
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1,460,333,300	1,121,798,900	76.82	98.52
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69 Paket	69 Paket	208,836,800	88,642,500	42.45	82.73
3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13 Jenis	13 Jenis	83,613,000	23,160,000	27.70	100
3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	13,300,000	9,080,000	68.27	100
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580 Laporan	580 Laporan	1,154,583,500	1,000,916,400	86.69	100
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	532,766,990	-	-	100
4.1	Pengadaan Mebel	55 Paket	55 Paket	226,834,200	-	-	100
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	276,012,790	-	-	100
4.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	29,920,000	-	-	100
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	2,434,935,050	2,216,172,597	91.02	100
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16,178,000	10,600,000	65.52	100
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	11,678,300	313,000	2.68	100
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Laporan	20 Laporan	2,407,078,750	2,205,259,597	91.62	100
6	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Tahun	1 Tahun	444,575,800	312,732,435	70.34	87.53
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peror	6 Unit	3 Unit	18,900,000	8,473,235	44.83	76.19
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenda	6 Unit	6 Unit	379,785,000	294,309,200	77.49	86.59
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	30 Unit	32,200,000	9,950,000	30.90	100
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	13,690,800	-	-	100

Uraian Program (Indikator)/Kegiatan/Sub Kegiatan			TARGET/ REALISASI					
			OUTCOME PROGRAM DAN SUB KEGIATAN		PAGU / REALISASI (RP)			
			Target	Realisasi	Pagu	Keuangan	%	FISIK
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				336,495,400	328,938,700	97.75	100
	Indikator : Persentase Desa Mandiri							
1	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama antar Desa				336,495,400	328,938,700	97.75	100
1.1	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		1 Dokumen	1 Dokumen	336,495,400	328,938,700	97.75	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5,529,582,500	3,736,754,054	67.58	100
	Indikator Sasaran : Cakupan Pemerintah Desa yang Tertib Administrasi							
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan				5,529,582,500	3,736,754,054	67.58	100
1.1	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen	1,090,125,400	541,024,270	49.63	100
1.2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		46 Dokumen	46 Dokumen	2,169,355,700	1,790,356,384	82.53	100
1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		267 Orang	267 Orang	408,117,600	388,826,500	95.27	100
1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	164,633,200	164,032,700	99.64	100
1.5	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa		2 Dokumen	2 Dokumen	886,181,100	343,420,000	38.75	100
1.6	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	573,104,600	271,149,300	47.31	100
1.7	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	1 Dokumen	238,064,900	237,944,900	99.95	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3,084,546,000	2,659,704,051	86.23	100
	Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif							
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten Kota				3,084,546,000	2,659,704,051	86.23	100
1.1	Fasilitas Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		2 Dokumen	2 Dokumen	185,188,000	171,304,600.00	92.50	100
1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1 Lembaga	1 Lembaga	186,492,200	179,537,800.00	96.27	100
1.3	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		47 Dokumen	47 Dokumen	1,726,898,000	1,648,236,651.00	95.44	100
1.4	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Unit	1 Unit	27,343,800	27,343,800.00	100.00	100
1.5	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	142,462,500	139,650,000.00	98.03	100
1.6	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	1 Dokumen	816,161,500	493,631,200.00	60.48	100

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran, disimpulkan keseluruhan sasaran tercapai dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. dari 2 sasaran yang sudah ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 indikator, bahwa sasaran 1 dengan target persentase kampung mandiri 40,98% terealisasi 100,00% sehingga capaian kinerjanya 244,02% termasuk dalam kategori capaian **“Sangat Tinggi”** dan sasaran 2 dengan target 91,15% terealisasi 91,95% sehingga capain kinerja 100,88% termasuk dalam kategori capaian **“Sangat Tinggi”**

Hasil pencapaian kinerja terhadap 2 sasaran strategis sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2024 perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di masa yang akan datang.

Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

- a) Mewujudkan perencanaan program dan kegiatan secara matang sesuai dengan sumber daya yang ada.
- b) Meningkatkan efisiensi, ekonomis, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program.
- c) Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- d) Melakukan pendampingan lebih intensif kepada pemerintah kampung agar dapat memenuhi indikator yang sudah ditetapkan melalui Indek Desa Membangun (IDM) agar bisa mempertahankan dan meningkatkan status Desa Mandiri Saat ini.
- e) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan kemasyarakatan agar dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat aktif dalam setiap program dan kegiatan di pemerintah kampung.
- f) Melakukan evaluasi terhadap keaktifan program dan kegiatan kelembagaan kampung dan kelurahan.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak di masa yang akan datang.

Siak Sri Indrapura, 11 Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**



Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN, M. Si
NIP. 196908161990021002